



9 772088 235001

## SIGNIFIKANSI TRAKTAT KEAMANAN BERSAMA INDONESIA–AUSTRALIA BAGI DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA

Desty Bulandari\*

### Abstrak

Terus berkembangnya lanskap keamanan di Indo-Pasifik mendorong Indonesia dan Australia untuk mempererat hubungan melalui Traktat Keamanan Bersama. Tulisan ini menganalisis signifikansi Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia dan implikasinya terhadap diplomasi pertahanan Indonesia. Traktat tersebut mengikat kedua negara untuk melakukan konsultasi rutin yang dapat memperdalam kepercayaan bilateral, meskipun masih terdapat potensi tantangan terkait interpretasi keamanan bersama, mekanisme konsultasi, dan kesiapan institusional. Traktat ini memberikan Indonesia kesempatan memperoleh pelatihan dan dialog strategis untuk modernisasi pertahanan, sekaligus berperan sebagai alat diplomasi pertahanan jangka panjang guna mendukung stabilitas regional. Komisi I DPR RI perlu mendorong Kementerian Pertahanan untuk mencermati implikasi hukum dan politik dari mekanisme konsultasi rutin yang disepakati guna memastikan kesesuaian dengan prinsip kebijakan luar negeri. Komisi I DPR RI juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap kesiapan antarinstansi, terutama Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri guna memastikan Indonesia memiliki kapasitas kelembagaan untuk melaksanakan traktat tersebut secara efektif.

### Pendahuluan

Lanskap keamanan yang terus berkembang di Indo-Pasifik menciptakan kerentanan bagi Indonesia dan Australia. Terlepas dari keanggotaan Australia dalam format keamanan minilateral seperti AUKUS dan Quad, persaingan antarnegara adidaya dan intensifikasi aktivitas militer di Laut Tiongkok Selatan telah meningkatkan urgensi bagi Australia untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Hal ini karena Australia memerlukan kerja sama kekuatan menengah yang stabil untuk menjaga keseimbangan regional. Pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese di markas Australian Navy HMAS Canberra pada 12 November 2025 menandai fase baru hubungan pertahanan Indonesia–Australia. Pertemuan tersebut menghasilkan penyelesaian negosiasi substantif Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia (Wiranto, 2025).

\*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: desty.bulandari@dpr.go.id.

Traktat ini lahir dari kesinambungan kerja sama keamanan bilateral sebelumnya serta masalah kepercayaan dalam beberapa tahun terakhir seiring langkah Australia melalui AUKUS, Quad, dan *Pukpuk Treaty* yang menimbulkan kekhawatiran di Indonesia. Oleh karena itu, traktat baru ini berupaya memulihkan kepercayaan strategis melalui mekanisme konsultasi reguler di tingkat pemimpin dan menteri. Hal tersebut menandakan relevansi Indonesia bagi Australia dan kebutuhan Australia untuk menyeimbangkan keberpihakan Barat tanpa mengesampingkan Indonesia. Tulisan ini menganalisis signifikansi Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia dan implikasinya terhadap diplomasi pertahanan Indonesia.

### **Signifikansi Traktat Keamanan Bersama bagi Hubungan Indonesia–Australia**

Australia dan Indonesia telah mengumumkan kesepakatan substantif mengenai Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia yang direncanakan untuk ditandatangani pada tahun 2026. Traktat tersebut mengikat kedua negara untuk mengadakan konsultasi rutin di tingkat pemimpin dan menteri mengenai isu-isu yang memengaruhi keamanan bersama mereka, termasuk jika terdapat tantangan yang merugikan salah satu pihak atau kepentingan keamanan bersama. Traktat ini juga mendorong kegiatan kerja sama keamanan yang saling menguntungkan (Senator the Hon Penny Wong, 2025).

Meskipun teks lengkapnya belum dirilis, PM Albanese mengungkapkan bahwa traktat tersebut didasarkan pada *Agreement on Maintaining Security* 1995, yang dibatalkan oleh Indonesia karena keterlibatan Australia di Timor Timur. Sejak kemerdekaan Timor Timur pada 2002, hubungan Indonesia–Australia terus membaik, yang mengarah pada *Lombok Treaty* 2006 dan *Defence Cooperation Agreement* 2024. Salah satu pendorong strategis utama di balik Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia adalah kekhawatiran yang sama atas meluasnya pengaruh serta kehadiran militer Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dan kawasan Pasifik ("Australia, Indonesia Agree", 2025).

Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia disepakati tidak berselang lama dari *PukPuk Treaty* yang menjamin pertahanan bersama serta interoperabilitas antara militer Australia dan Papua Nugini. Menurut David Andrews dari National Security College, Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia berpotensi melampaui *PukPuk Treaty* dalam hal signifikansi, terutama mengingat proyeksi Indonesia mencapai ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2050. Andrews menambahkan, Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia membuka pintu untuk membawa hubungan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi di saat ketidakstabilan regional semakin meningkat. Meskipun Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia bukan merupakan perjanjian atau aliansi pertahanan bersama secara khusus seperti *Pukpuk Treaty*, penekanan pada konsultasi serta pertimbangan mengenai aksi bersama telah konsisten dengan kemitraan keamanan Australia saat ini dengan Jepang, Malaysia, dan Singapura (Caisley, Swanston, & Dziedzic, 2025).



Bagi Indonesia, Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia menawarkan manfaat strategis, termasuk pengembangan kepercayaan yang lebih dalam dengan Australia dan pembentukan kerangka untuk kerja sama keamanan terkoordinasi. Melalui komitmen ini, Indonesia dapat meningkatkan pengaruhnya dalam dinamika keamanan regional, memperkuat pengelolaan maritim dan perbatasan, serta memastikan prioritasnya dipertimbangkan dalam kebijakan regional Australia.

Namun, Surya Wiranto selaku Penasihat Indopacific Strategic Intelligence menyatakan bahwa traktat tersebut juga menghadirkan potensi tantangan. *Pertama*, perbedaan dalam menafsirkan "keamanan bersama" dapat menciptakan asimetri, dengan Australia berpotensi membingkainya sebagai langkah memperluas kepentingan keamanan kolektif Barat, sementara Indonesia menekankan kesetaraan dan non-intervensi. *Kedua*, mekanisme konsultasi saat salah satu negara menghadapi ancaman dapat menjerumuskan Indonesia pada dilema strategis jika terjadi eskalasi yang melibatkan Australia dan Tiongkok. *Ketiga*, perlu koordinasi untuk merespons isu keamanan secara cepat, khususnya antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Intelijen Negara yang membutuhkan kesiapan kelembagaan serta birokrasi yang fleksibel (Wiranto, 2025).

Secara keseluruhan, signifikansi Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia terletak pada arahnya dalam mengkonsolidasikan kerja sama keamanan bilateral jangka panjang, menegaskan kembali relevansi bersama di tengah meningkatnya tekanan eksternal, dan menyediakan mekanisme terstruktur untuk konsultasi. Penekanan traktat ini pada pembangunan kepercayaan, tanggapan terkoordinasi, serta dialog berkelanjutan memposisikan kedua negara untuk menavigasi volatilitas Indo-Pasifik secara lebih efektif.

### **Implikasi terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia**

Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia mengutamakan kerja sama melalui mekanisme konsultasi alih-alih aliansi, yang memungkinkan Indonesia untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya serta memanfaatkan kemampuan militer Australia tanpa mengorbankan kebijakan luar negeri "bebas dan aktif" maupun prinsip non-blok yang dijunjung. Bagi Australia, mekanisme konsultasi rutin memberikan jaminan strategis di sepanjang perbatasan utaranya. Di samping itu, traktat tersebut memperkuat kepercayaan politik antara Australia dan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, serta mencerminkan komitmen Australia menyangkut keterlibatan yang inklusif di Indo-Pasifik (Sasmita, 2025).

Adapun Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia berimplikasi penting bagi diplomasi pertahanan dengan menciptakan kerangka untuk konsultasi yang dapat berkembang menjadi kerja sama praktis yang lebih mendalam. Traktat ini mengarah pada penilaian ancaman hingga respons bersama, serta mekanisme pertukaran informasi. Dengan menyelaraskan persepsi ancaman bagi kedua negara, salah satunya yang berkaitan dengan stabilitas maritim, traktat ini dapat memperkuat interoperabilitas pertahanan bilateral.



Di tengah kegelisahan akan militerisasi Laut Tiongkok Selatan, jangkauan pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik, dan ketidakpastian tentang kepemimpinan global Amerika Serikat, Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia memperlihatkan bagaimana diplomasi pertahanan kedua negara mengupayakan konsultasi berkala yang lebih kuat dan terlembagakan. Namun, traktat ini tidak boleh disalahartikan sebagai aliansi militer. Indonesia tidak akan berkomitmen pada keamanan Australia, juga tidak akan mengharapkan Australia berkomitmen pada keamanan Indonesia. Adapun Indonesia tidak hanya memperkuat hubungan keamanan dengan Australia. Presiden Prabowo juga telah memperdalam hubungan dengan Amerika Serikat dan Prancis, memperluas hubungan dengan Rusia, serta memajukan kerja sama pertahanan baru dengan Tiongkok. Sebagai bagian dari *balancing act*, di antara semua kemitraan keamanan Indonesia, hubungan Indonesia–Australia menjadi salah satu yang paling komprehensif dan terlembaga. Bagi Indonesia, hubungan yang lebih erat dengan Australia membuka akses terhadap pelatihan dan dialog strategis yang dapat meningkatkan agenda modernisasi pertahanannya (Priyandita, 2025).

Perluasan cakupan Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia memungkinkan kedua negara untuk bekerja sama dalam menghadapi ancaman hibrida, yang menggabungkan perangkat konvensional dan nonkonvensional, seperti serangan siber. Signifikansi atas praktik konsultasi yang konsisten akan mengarah kepada pelindungan dari kesalahan perhitungan di era volatilitas geopolitik (Priyandita, 2025). Dalam konteks diplomasi pertahanan, traktat tersebut turut menjadi instrumen strategis jangka panjang untuk membentuk tatanan regional yang stabil yang mencerminkan kepentingan keamanan kedua negara.

## Penutup

Dinamika di Indo-Pasifik mendorong Indonesia dan Australia memperkuat kemitraan melalui Traktat Keamanan Bersama, yang menandai fase baru hubungan pertahanan kedua negara. Traktat tersebut mengikat kedua negara untuk mengadakan konsultasi rutin yang dapat memperdalam kepercayaan bilateral, meskipun masih terdapat potensi tantangan terkait interpretasi keamanan bersama, mekanisme konsultasi, dan kesiapan institusional. Traktat ini membuka akses bagi Indonesia terhadap pelatihan dan dialog strategis untuk modernisasi pertahanan, sekaligus menjadi instrumen diplomasi pertahanan jangka panjang untuk mendukung stabilitas regional.

Mengingat cakupan traktat ini, Komisi I DPR RI perlu mendorong Kementerian Pertahanan untuk mencermati implikasi hukum dan politik dari mekanisme konsultasi rutin yang disepakati. Hal ini guna memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak bergeser dari prinsip kebijakan luar negeri. Komisi I DPR RI juga dapat memperkuat pengawasannya terhadap kesiapan antarinstitusi, terutama Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri untuk menjamin bahwa Indonesia memiliki kapasitas kelembagaan yang efektif untuk mengimplementasikan traktat ini.



## Referensi

- Australia, Indonesia agree to upgraded defence pact. (2025, November 12). *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2025/11/12/australia-indonesia-agree-to-upgraded-defence-pact>
- Caisley, O., Swanston, T., & Dziedzic, S. (2025, November 12). Australia and Indonesia strike landmark security treaty. *ABC NEWS*. <https://www.abc.net.au/news/2025-11-12/australia-and-indonesia-strike-landmark-security-treat/106001570>
- Priyandita, G. (2025, November 14). Old words, new realities: what the Australia–Indonesia security treaty means. *The Strategist*. <https://www.aspistrategist.org.au/old-words-new-realities-what-the-australia-indonesia-security-treaty-means/>
- Sasmita, R. P. (2025, November 12). Indonesia-Australia security pact a timely model for middle powers. *Asia Times*. <https://asiatimes.com/2025/11/indonesia-australia-security-pact-a-timely-model-for-middle-powers/>
- Senator the Hon Penny Wong. (2025, November 12). *Statement on Australia-Indonesia Treaty on Common Security*. Minister for Foreign Affairs. <https://www.foreignminister.gov.au/minister/penny-wong/media-release/statement-australia-indonesia-treaty-common-security>
- Wiranto, S. (2025, November 14). *Analisis strategis traktat keamanan Indonesia-Australia 2025*. <https://rmol.id/amp/2025/11/13/686595/analisis-strategis-traktat-keamanan-indonesia-australia-2025>

